

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sebuah sistem dimana didalamnya terjadi proses belajar mengajar yang melibatkan siswa dan guru (pendidik) ditunjukkan dengan adanya transformasi ilmu (Fitriana & Latief, 2019). Pendidikan memiliki peranan penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan diharapkan mampu membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri dan keterampilan yang dimiliki siswa yang kelak akan berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat sekitar, dan terlebih lagi bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

Siswa sebagai *output* dari pendidikan, yang mana merupakan penerus pembangunan bangsa, diharapkan untuk siap menghadapi tantangan masa depan dan mampu bersaing secara positif. Menciptakan tenaga kerja ahli merupakan salah satu peran utama pendidikan. Joniartawan, Santiyadnya, dan Indrawan (2018) mengemukakan bahwa dengan adanya perkembangan jaman yang semakin pesat, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, memiliki keahlian dan keterampilan yang baik agar nantinya mampu bersaing secara global. Dengan demikian, diperlukannya peningkatan mutu pendidikan sehingga kompetensi yang dimiliki siswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan mutu pendidikan dapat memberikan efek terhadap perkembangan sumber daya manusia sehingga terciptanya sumber daya manusia yang handal dalam bidangnya dan profesional.

Dalam mempersiapkan lulusan dengan kompetensi yang mumpuni dan profesional dalam bidang yang ditekuni dan siap terjun ke dunia kerja, sekolah kejuruan memegang peranan yang sangat penting (Irianti et al., 2016) . Sekolah kejuruan merupakan salah satu penyelenggara pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk mencetak lulusan yang siap kerja, memiliki keterampilan mumpuni sesuai dengan bidangnya dan juga memiliki daya saing tinggi (Kusuma et al., 2019). Siswa yang lulus dari sekolah kejuruan telah dibekali dengan keterampilan-keterampilan tertentu agar nantinya dapat bersaing dengan baik dan secara positif sebagai pekerja di dunia usaha atau dunia industri, maupun dalam mendirikan usahanya sendiri.

Dengan demikian, lulusan sekolah kejuruan harus memiliki kesiapan yang matang agar mampu memenangkan persaingan dalam dunia kerja. Lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) harus memiliki kesiapan kerja yang baik sebelum terjun langsung ke dunia industri agar nantinya mampu memenangkan persaingan (Kusuma et al., 2019). Untuk siap berkecimpung dalam dunia kerja, maka siswa perlu memiliki *skill* (kecakapan, kemampuan) yang baik dan mumpuni sesuai dengan bidang pengetahuan dan wawasan ilmu yang ditekuni. Hal tersebut didapatkan siswa melalui program praktik kerja lapangan (PKL).

Program PKL yang ditawarkan merupakan suatu keunggulan sekolah menengah kejuruan (SMK) dibandingkan sekolah menengah atas (SMA). Menurut Kusuma et al., (2019), program PKL yang merupakan keunggulan SMK mampu membentuk lulusan siap kerja melalui pengalaman praktik secara langsung di dunia industri. Dengan demikian, siswa yang telah merasakan lingkungan kerja sebelum memasuki dunia industri, diharapkan kedepannya

memiliki kepercayaan diri yang lebih dan tidak merasa asing dengan lingkungan kerjanya kelak. Siswa yang sudah melaksanakan PKL akan lebih memahami pekerjaan sehingga ia akan memiliki informasi tentang lingkungan pekerjaan yang lebih memadai, dapat menentukan pilihan-pilihan yang lebih tepat, jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki informasi yang cukup memadai. Pelaksanaan PKL melibatkan praktisi ahli yang berpengalaman di bidangnya untuk memperkuat pembelajaran praktik dengan cara pembimbingan (Paturahman et al., 2019).

Program PKL merupakan program wajib yang harus diikuti siswa sekolah kejuruan. PKL dapat didefinisikan sebagai kegiatan pembelajaran praktik untuk menerapkan, memantapkan, dan meningkatkan kompetensi peserta didik (Paturahman et al., 2019). Program PKL ini merupakan pengembangan *softskill* yang dibutuhkan pada dunia kerja, dan wajib dilakukan oleh siswa sebagai salah satu syarat mereka untuk dapat lulus dari sekolah kejuruan (Fitriana & Latief, 2019). PKL merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan PKL memadukan kegiatan belajar di sekolah dan kegiatan pendalaman keahlian dengan bekerja langsung pada dunia industri yang memfasilitasi suasana dan keadaan sesungguhnya dan relevan dengan kompetensi yang telah di pelajari siswa di sekolah (Kusuma et al., 2019). Sehingga pada akhirnya siswa memperoleh pengalaman dari PKL dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam, untuk nantinya siap bekerja setelah lulus. Sejalan dengan ini, Joniartawan et al., (2018) dan Fitriana et al., (2019) berpendapat bahwa program PKL merupakan suatu bentuk implementasi secara sistematis antara

program pendidikan yang di dapatnya di sekolah dengan penguasaan keahlian pada dunia kerja secara langsung guna mencapai suatu tingkat keahlian tertentu.

Tujuan dari adanya pelaksanaan program PKL pada sekolah kejuruan yaitu sebagai program aktualisasi penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda antara SMK dan dunia industri (DI), dimana siswa mengikuti program pendidikan di sekolah dan mengikuti program penguasaan keahlian di dunia industri (DI) (Hikmat et al., 2016). Selain itu, pelaksanaan program PKL pada sekolah kejuruan bertujuan untuk memilah kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa yang dapat dilaksanakan di sekolah dan yang dapat dilaksanakan di dunia industri, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Berikutnya, program PKL diharapkan mampu memberikan pengalaman kerja langsung kepada peserta didik, sehingga nantinya peserta didik mampu bekerja dengan melihat proses dan hasil kerja. Terakhir, program PKL bertujuan untuk menyiapkan siswa untuk memiliki etos kerja yang tinggi yang siap memasuki dunia kerja, dan mampu bersaing secara positif secara global (Fitriana & Latief, 2019; Kusuma et al., 2019). Fitriana et al., (2019) juga menambahkan bahwa PKL memberikan kesempatan pada siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja secara langsung (real) untuk menanamkan sikap kerja yang positif yang berorientasi pada proses dan hasil kerja, dan juga memberikan bekal berupa etos kerja yang tinggi kepada siswa, sehingga mereka siap untuk masuk ke dunia kerja dan menghadapi tuntutan global. Sementara itu, Joniartawan et al., (2018) mengemukakan bahwa tujuan dari pelaksanaan program PKL ini adalah untuk meningkatkan kualitas keahlian dan keterampilan siswa agar nantinya pada saat lulus, siswa sudah memiliki keterampilan dan keahlian yang mumpuni dan bermutu tinggi sehingga mampu bersaing dalam

perkembangan jaman. Suartika, Dantes, dan Candiasa (2013) menambahkan tujuan dari pelaksanaan praktik kerja lapangan yaitu memberikan kesempatan kepada siswa di sekolah menengah kejuruan untuk mendalami dan merasakan bagaimana situasi dan kondisi di dunia kerja sesuai dengan program studi keahliannya.

SMK Negeri 5 Denpasar merupakan salah satu sekolah kejuruan yang berlokasi di Bali, yang hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dari lulusannya dengan cara meningkatkan kesiapan kerja siswa dengan kompetensi yang tinggi di bidang yang ditekuni, dan siap untuk bersaing secara global. SMK Negeri 5 memiliki lima pilihan kompetensi keahlian, salah satunya adalah kompetensi keahlian Kuliner. Pada program keahlian Kuliner ini, peserta didik diberikan keterampilan dan pengetahuan mengenai pengolahan, penyajian, dan pelayanan makanan dan minuman. Kemudian, untuk membantu siswa dalam mengaplikasikan teori yang telah dipelajarinya, maka siswa wajib mengikuti program PKL di restaurant hotel.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, pelaksanaan program PKL di SMK Negeri 5 Denpasar belum optimal dan masih mengalami berbagai kendala. Sebagian siswa yang mengikuti program PKL merasa bahwa dirinya masih kurang percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Banyak pula siswa yang belum memahami dengan baik *job description* mereka, sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik. Selain itu, tidak jarang siswa mengalami *shock* ketika mereka mengikuti program PKL sehingga cenderung melakukan kesalahan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Kemudian,

pihak penyelenggara program PKL masih menemui kesulitan dalam mencari tempat PKL karena banyak tempat industri yang menolak untuk bekerjasama lantaran kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki siswa dengan kebutuhan dari pihak industri. Pada saat pelaksanaan program PKL, tidak jarang peserta PKL mengalami ketidakcocokan antara bidang keahlian yang dimiliki dengan pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, siswa juga kerap kali mengalami kebingungan dalam penggunaan fasilitas yang disediakan pihak industri, karena perbedaan sarana dan prasarana yang disediakan sekolah dan pihak industri berbeda.

Permasalahan yang ditemui di SMK Negeri 5 Denpasar juga serupa seperti yang diungkapkan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Kusuma et al., (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa siswa masih merasa canggung terhadap lingkungan kerjanya dikarenakan pada saat pelaksanaan PKL tidak semua siswa mendapatkan tempat PKL yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya. Dalam pelaksanaan program PKL, sering kali ditemukan siswa yang sedang mengikuti program PKL tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya sesuai dengan bidang keahliannya (Paturahman et al., 2019). Hal ini terjadi berkaitan dengan alasan sensitivitas dan kode etik perusahaan. Paturahman et al., (2019) juga menambahkan bahwa siswa seringkali ditempatkan pada tempat-tempat yang tidak berkaitan dengan bidang keahlian mereka. Dengan demikian, timbulah tumpang tindih (overlap) saat praktik kerja lapangan dengan antara Kuliner dan F&B service (food and beverage service) di restaurant.

Pelaksanaan PKL dibutuhkan untuk memantapkan kompetensi siswa. Kompetensi siswa sendiri sebenarnya sudah dibentuk pada saat di sekolah tetapi

sekolah belum cukup untuk memberikan kompetensi (Iriani & Soeharto, 2015). Pembelajaran di sekolah masih memiliki keterbatasan baik sarana maupun prasarana. Peralatan praktik di sekolah belum lengkap dan masih kurang sehingga perlu pembelajaran di industri. Selain itu, di sekolah siswa hanya mempelajari teknik-teknik saja tetapi di industri siswa membuat makanan untuk disajikan kepada tamu. Dengan demikian siswa akan membuat makanan sesuai dengan standar industri khususnya hotel.

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung kesiapan siswa untuk mengikuti program PKL. Namun, banyak sekolah kejuruan yang memiliki keterbatasan dalam ketersediaan sarana dan prasana yang dapat mendukung siswanya. Kusuma et al., (2019) mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah masih belum menyerupai kondisi di industri, sehingga banyak siswa sekolah kejuruan yang merasa bingung dan terkejut saat terjun langsung di dunia industri dalam program PKL.

Kusuma et al., (2019) menambahkan bahwa keberhasilan suatu program PKL tidaklah hanya ditentukan oleh siswa, tetapi juga ditentukan oleh kesiapan perencanaan program, kompetensi materi yang telah dipetakan sebelumnya, kesiapan program jurusan, dan juga kesiapan guru pembimbing. Selanjutnya Kusuma et al., (2019) juga menyatakan bahwa saat ini pendidikan kejuruan masih menghadapi kendala kesepadanan kualitatif dan kuantitatif. Kesepadanan kualitatif yang dimaksud adalah terjadinya kesenjangan antara lulusan SMK dengan kompetensi yang diharapkan oleh dunia industri. Perkembangan di teknologi dan dunia industri yang sangat pesat menyebabkan semakin tinggi tuntutan yang diberikan oleh pihak industri, namun kompetensi yang dimiliki

siswa belum mampu mencapai tuntutan tersebut. Disisi lain, pendidikan kejuruan juga mengalami kesenjangan kuantitatif. Hal ini berkaitan dengan jumlah lapangan pekerjaan. Banyaknya lulusan yang mencari kerja, tidak sepadan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

Permasalahan-permasalahan yang dialami siswa ini dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari pelaksanaan program PKL, yang mana hal ini berdampak pada ketidaksiapan siswa untuk masuk kedunia kerja, karena siswa tidak dapat menguasai standar kompetensi secara baik. Dengan demikian, perlu diadakannya evaluasi program pelaksanaan PKL, agar kemudian dapat dilakukan pengambilan keputusan mengenai program PKL kedepannya di SMK N 5 Denpasar.

Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisisensi, efektivitas dan dampak kegiatan-kegiatan proyek atau program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan obyektif (Khasanah et al., 2019). Evaluasi merupakan salah satu rangkaian penting dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan suatu program. Dengan adanya evaluasi program akan diketahui unsur program yang belum terealisasi untuk diperbaiki dan dilaksanakan pada pelaksanaan program selanjutnya (Ramayanti & Sukardi, 2021).

Evaluasi program merupakan evaluasi dengan tujuan untuk menilai efektivitas dalam bidang pendidikan dengan cara mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dan informasi tersebut dalam bentuk skor atau nilai yang telah ditentukan sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan dan rekomendasi untuk menentukan kebijakan bagi para pengambil keputusan (Paturahman et al., 2019). Arikunto, Suharsimi, dan Jabar (2014)

mengungkapkan bahwa evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Arikunto et al., (2014) mengungkapkan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasi dan kemudian menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Khasanah et al., (2019) menambahkan bahwa evaluasi program adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan suatu objek yang dilakukan secara terencana, sistematis dengan arah dan tujuan yang jelas.

Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi program dipilih sebagai solusi dalam peningkatan kualitas PKL siswa di SMK Negeri 5 Denpasar guna melihat efektivitas dari pelaksanaan program, yang juga berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan program. Sehingga, untuk kedepannya didapatkan informasi mengenai unsur pelaksanaan program PKL yang belum terlaksana dengan baik untuk kemudian mencari solusi dan juga mempertahankan unsur program yang dapat meningkatkan efektivitas program PKL sehingga pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan program.

Dalam pelaksanaan evaluasi program pada penelitian saat ini digunakan model evaluasi CIPP oleh Stufflebeam, yang menitikberatkan pada empat komponen, yaitu context evaluation (penilaian konteks), input evaluation (penilaian tentang masukan), process evaluation (penilaian tentang proses) dan product evaluation (penilaian tentang product/hasil). Peneliti menggunakan model evaluasi CIPP karena model evaluasi CIPP ini menjelaskan tahap demi tahap setiap proses program PKL, baik dari awal program PKL dilaksanakan sampai hasil dari program PKL yang dijelaskan secara terperinci. Juri et al. (2021) telah

melakukan penelitian dengan menggunakan model evaluasi CIPP karena model evaluasi ini mempermudah peneliti untuk mendapatkan hasil mengenai pelaksanaan suatu program dengan hasil penelitian yang lebih rinci. Sejalan dengan ini, Batubara (2018) mengemukakan bahwa model evaluasi CIPP dapat memberikan rincian secara detail terkait pelaksanaan PKL ditinjau dari siswa, guru pembimbing, sarana prasarana, sumber dana/pembiayaan, tata tertib, dan kurikulum/relevansi program. Sehingga mempermudah peneliti untuk mengetahui efektivitas program.

Komponen pertama dari pelaksanaan evaluasi program CIPP adalah penilaian konteks. Penilaian konteks merupakan gambaran dari spesifikasi lingkungan program, kebutuhan yang belum terpenuhi dan tujuan program (Indriyanti, 2022). Dalam hal ini, evaluasi konteks bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi konteks ini sebagian tugasnya adalah melakukan *need assesment* (Yuliana et al., 2021). Selain dari *need assesment*, evaluasi konteks juga harus dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan *need* (kebutuhan) yang telah diidentifikasi.

Komponen selanjutnya adalah penilaian masukan. Penilaian masukan ini dilakukan dengan cara membandingkan apakah strategi pemecahan masalah dan perancangan tahap-tahap kegiatan sudah relevan, layak dan ekonomis sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki (Indriyanti, 2022). Penilaian terhadap masukan bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu perancang program untuk memilih dan membuat program yang dapat membawa perubahan yang diinginkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Komponen ketiga dari model evaluasi CIPP adalah penilaian proses. Penilaian proses adalah aspek penting dari implementasi program. Penilaian proses berguna untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi (Indriyanti, 2022). Penilaian proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Dengan kata lain penilaian proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, penilaian proses menyediakan informasi untuk para evaluator melakukan prosedur monitoring terpilih yang mungkin baru diimplementasi sehingga butir yang kuat dapat dimanfaatkan dan yang lemah dapat dihilangkan. Dengan demikian, keputusan-keputusan yang diperlukan dalam usaha memperbaiki proses yang sedang berlangsung dapat dilaksanakan.

Komponen terakhir dari evaluasi model CIPP adalah penilaian hasil. Penilaian hasil adalah suatu proses mengakomodasi informasi untuk meyakinkan dalam kondisi apa tujuan dapat dicapai dan juga untuk menentukan, jika strategi yang berkaitan dengan prosedur dan metode yang diterapkan guna mencapai tujuan sebaiknya berhenti, modifikasi atau dilanjutkan dalam bentuk yang sekarang (Indriyanti, 2022). Dalam hal ini, hasil penilaian proses diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat membantu evaluator dalam mengambil sebuah keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir maupun modifikasi program. Tujuan utama dari penilaian hasil adalah untuk menentukan sampai sejauh mana program yang telah diimplementasikan tersebut dapat memenuhi

kebutuhan kelompok yang menggunakannya. Melalui proses yang dilakukan dalam mengevaluasi program kebijakan praktik kerja lapangan, pihak sekolah dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pelaksanaan program praktik kerja lapangan yang telah dilaksanakan tersebut. Hasil penilaian tersebut akan memunculkan aspek dari program yang membutuhkan perhatian khusus, yang dalam hal ini akan dijadikan sebagai acuan dalam program praktik kerja lapangan selanjutnya yang dilakukan melalui proses pembekalan dan proses pembelajaran di sekolah sehingga dapat berdampak terhadap peningkatan kesiapan kerja siswa SMK Negeri 5 Denpasar di masa yang akan datang.

Bertolak dari latar belakang dan juga permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan dikemukakan peneliti lain, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Evaluasi Pelaksanaan Program PKL Peserta Didik Kelas XI pada Jurusan Kuliner di SMK Negeri 5 Denpasar”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah yang menjadi titik berat dalam pelaksanaan program praktik kerja lapangan di SMK Negeri 5 Denpasar, dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya ketidakcocokan antara bidang keahlian peserta didik saat melaksanakan PKL dengan pekerjaan yang dilakukan di tempat praktik. Pada saat pelaksanaan PKL pada satu restoran, 4 orang siswa dilarang terlibat langsung dalam pekerjaan di tempat praktik. Siswa hanya diberikan tanggung jawab untuk melakukan hal-hal sederhana seperti mengupas bawang,

memotong sayuran, dan lain-lain. Hal ini berdampak pada perkembangan keahlian siswa.

2. Materi pembelajaran di tempat PKL yang kurang sesuai dengan keahlian siswa. Belum dilakukannya sinkronisasi dan validasi kurikulum di sekolah dengan standar dunia kerja. Hal ini menyebabkan pendidikan formal belum sepenuhnya memberikan bekal bagi lulusannya untuk dapat bekerja sesuai dengan bidang keahlian.
3. Keterbatasan keterampilan kerja yang dimiliki para siswa dalam pelaksanaan PKL. Sering kali, teori yang dipelajari oleh siswa berbeda dengan apa yang dilakukan oleh senior dan instruktunya di tempat praktek. Sehingga, siswa keterampilan kerja yang dimiliki siswa terbatas.
4. Siswa mengalami kesulitan dalam beradaptasi di tempat PKL. Hal ini berkaitan dengan perbedaan sarana dan prasaranan di sekolah dengan di tempat praktik, sehingga siswa memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi terkait penggunaan sarana dan prasarana di tempat praktik.
5. Instruktur di industri belum disiapkan sepenuhnya untuk membimbing. Beberapa instruktur di industri hanya menerima siswa yang datang dan kemudian mengarahkan siswa untuk terjun langsung ke dapur. Banyak instruktur yang belum mampu membimbing siswa, seperti memberikan penjelasan mengenai hal-hal penting yang harus dipahami siswa terkait kondisi di tempat PKL dan juga hal-hal yang harus dikuasai siswa.
6. Kurangnya monitoring dari pihak sekolah di tempat PKL. Karena jumlah siswa yang mengikuti kegiatan PKL cukup banyak dan melaksanakan PKL di

beberapa tempat yang berbeda, hal ini mengakibatkan kurangnya waktu yang dimiliki guru untuk melakukan monitoring.

7. Penyelenggara mengalami kesulitan dalam mencari tempat PKL yang sesuai. Beberapa industri melakukan penolakan terhadap siswa PKL dikarenakan mereka merasa tidak memiliki tempat yang cukup untuk menerima siswa PKL, dikarenakan kondisi industri yang tidak memungkinkan. Beberapa industri juga menolak karena belum siap untuk menerima siswa PKL. Selain itu, beberapa tempat PKL sudah terlebih dahulu menerima siswa PKL dari sekolah lain.
8. Jarak antara tempat PKL dengan rumah siswa cukup jauh. Banyak siswa mengeluhkan tempat PKL mereka cukup jauh dari rumah mereka. Beberapa siswa harus berangkat 1 jam sebelum jadwal PKL mereka dimulai.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, banyak faktor yang dapat terlibat, untuk itu penulis berupaya untuk membatasi permasalahan agar tidak terlalu meluas serta tidak menyimpang dari ruang lingkup pembahasan. Dalam kajian penelitian ini, batasan-batasan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Fokus penelitian yang akan diangkat adalah efektivitas pelaksanaan program praktik kerja lapangan khususnya pada jurusan Kuliner di SMK Negeri 5 Denpasar.
2. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model CIPP.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas Pelaksanaan Program PKL pada Jurusan Kuliner di SMK Negeri 5 Denpasar ditinjau dari komponen *Context*?
2. Bagaimanakah efektivitas Pelaksanaan Program PKL pada Jurusan Kuliner di SMK Negeri 5 Denpasar ditinjau dari komponen *Input*?
3. Bagaimanakah efektivitas Pelaksanaan Program PKL pada Jurusan Kuliner di SMK Negeri 5 Denpasar ditinjau dari komponen *Proses*?
4. Bagaimanakah efektivitas Pelaksanaan Program PKL pada Jurusan Kuliner di SMK Negeri 5 Denpasar ditinjau dari komponen *Product*?
5. Bagaimana hasil evaluasi secara bersama-sama terhadap Pelaksanaan Program PKL pada Jurusan Kuliner di SMK Negeri 5 Denpasar yang ditinjau dari *context, input, process, product*?
6. Apa saja yang menjadi kendala-kendala dan solusi dalam pemecahan masalah Program PKL pada Jurusan Kuliner di SMK Negeri 5 Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan evaluasi program Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada SMK Negeri 5 Denpasar. Dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Program PKL pada Jurusan Kuliner di SMK Negeri 5 Denpasar ditinjau dari komponen *Context*.

2. Untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Program PKL pada Jurusan Kuliner di SMK Negeri 5 Denpasar ditinjau dari komponen *Input*.
3. Untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Program PKL pada Jurusan Kuliner di SMK Negeri 5 Denpasar ditinjau dari komponen *Proses*.
4. Untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Program PKL pada Jurusan Kuliner di SMK Negeri 5 Denpasar ditinjau dari komponen *Product*.
5. Untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Program PKL pada Jurusan Kuliner di SMK Negeri 5 Denpasar pada *context, input, process, product*.
6. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi dalam pemecahan masalah Pelaksanaan Program PKL pada Jurusan Kuliner di SMK Negeri 5 Denpasar.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran evaluasi program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam meningkatkan kesiapan kerja siswa, serta sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan refleksi terhadap pelaksanaan di waktu yang akan datang agar pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang sudah baik untuk dipertahankan dan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang akan datang.

- b. Bagi pimpinan yang dalam hal ini adalah kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan input bagi sekolah dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- c. Bagi pihak sekolah SMK Negeri 5 Denpasar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan melakukan perbaikan baik *context*, *input*, *process*, dan *product*, pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan selanjutnya dalam pelaksanaan PKL.
- d. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lebih lanjut dengan kajian lebih mendalam di bidang evaluasi.

